

Langkah-Langkah Percepatan Pembangunan PUG oleh DISDUKCAPIL Bengkayang

1. Tahap Persiapan (Bulan 1-3: Bangun Fondasi Pelembagaan PUG di Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Tujuan: Memenuhi prasyarat PUG seperti regulasi, SDM, dan data terpisah, dengan fokus pada isu gender seperti kesenjangan akses perempuan ke layanan pencatatan sipil, data terpisah untuk IPG, dan pencegahan pernikahan anak.

- **Langkah 1.1: Perkuat Regulasi dan Kebijakan Internal PUG**
Susun pedoman teknis PUG khusus DISDUKCAPIL, seperti integrasi gender ke dalam layanan pencatatan sipil dan administrasi kependudukan, berdasarkan regulasi nasional seperti Inpres No. 9/2000 dan pedoman PUG sektor administrasi kependudukan. Ajukan ke Bupati/Sekda untuk pengesahan sebagai Petunjuk Teknis (Juknis) atau Keputusan Sekda, mencakup 7 proses pembangunan (perencanaan hingga pelaporan).
Aksi: Koordinasi dengan Bagian Hukum untuk drafting, integrasikan ke kebijakan verifikasi umur pernikahan dan data terpisah.
Tanggung Jawab: Kepala DISDUKCAPIL sebagai pengusul, kolaborasi dengan Bappeda.
Bukti Dukung: Juknis atau Keputusan Sekda yang diundangkan.
Indikator Target: Regulasi mencakup seluruh 7 proses, sesuai kriteria APE.
- **Langkah 1.2: Tingkatkan Kapasitas SDM dan Internalisasi PUG**
Latih SDM (perencana, penganggaran, teknis/petugas pencatatan, pemantau, evaluator) melalui pelatihan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Tunjuk Gender Focal Point di setiap seksi (misalnya seksi pencatatan sipil, administrasi kependudukan) dengan SK, serta Gender Champions (misalnya petugas pelayanan berpengaruh) untuk advokasi. Ikuti pelatihan dari Kemen PPPA atau Kementerian Dalam Negeri.
Aksi: Gelar sosialisasi internal, target 80% SDM terlatih (hitung persentase seperti rumus di form penilaian).
Tanggung Jawab: Seksi Pencatatan Sipil sebagai koordinator.
Bukti Dukung: Sertifikat pelatihan, SK penunjukan, laporan kegiatan.
Indikator Target: Persentase SDM terlatih >80%, focal point aktif di seluruh seksi.
- **Langkah 1.3: Kembangkan Sistem Data Terpisah Gender**
Kumpul dan validasi data terpisah gender untuk administrasi kependudukan (misalnya jumlah penduduk laki-laki/perempuan, akses perempuan ke akta kelahiran/pernikahan), di luar data BPS. Bangun sistem informasi data gender (misalnya database online untuk IPG).
Aksi: Kolaborasi dengan Dinas Kominfo untuk platform digital, target 100% layanan

memiliki data terpilah.

Tanggung Jawab: Seksi Administrasi Kependudukan.

Bukti Dukung: Daftar data terpilah, screenshot sistem, publikasi data.

Indikator Target: Persentase PD dengan data terpilah >90%.

2. Tahap Implementasi (Bulan 4-9: Integrasikan PUG ke Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Tujuan: Pastikan program responsif gender, dengan output seperti akses inklusif perempuan ke layanan sipil dan pencegahan pernikahan anak.

- **Langkah 2.1: Integrasikan Gender ke Perencanaan Responsif**
Lakukan analisis gender menggunakan GAP untuk identifikasi isu (misalnya kesenjangan akses perempuan ke layanan pencatatan di daerah terpencil, pernikahan anak). Integrasikan ke RKPD, Renstra, dan Renja DISDUKCAPIL, termasuk isu strategis, sasaran, indikator.
Aksi: Fasilitasi workshop dengan masyarakat, target 100% dokumen responsif.
Tanggung Jawab: Tim Gender Focal Point.
Bukti Dukung: Dokumen Renja dengan analisis GAP.
Indikator Target: Persentase program responsif >90%.
- **Langkah 2.2: Dorong Penganggaran Responsif Gender (ARG)**
Susun GBS untuk program seperti pelatihan petugas layanan gender-sensitive, kampanye pencegahan pernikahan anak. Alokasikan ARG (misalnya Rp 50 juta untuk layanan mobile sipil bagi perempuan), pastikan peningkatan dari tahun sebelumnya.
Aksi: Review RKA/DPA, target ARG >5% anggaran dinas.
Tanggung Jawab: Seksi Perencanaan.
Bukti Dukung: TOR ARG, daftar kegiatan dengan nilai rupiah.
Indikator Target: Persentase ARG >80% program.
- **Langkah 2.3: Tingkatkan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Gender**
Jalankan program seperti layanan pencatatan sipil mobile untuk perempuan rentan, kampanye kesetaraan gender dalam administrasi kependudukan, pencegahan pernikahan anak melalui verifikasi. Bangun LPLPP untuk konseling sipil gender-sensitive. Libatkan masyarakat, media, akademisi.
Aksi: Kerja sama dengan NGO, target peningkatan manfaat bagi perempuan >50%.
Tanggung Jawab: Seksi Pelayanan Sipil.
Bukti Dukung: Laporan output, dokumentasi.
Indikator Target: Persentase program komprehensif >90%.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Bulan 10-12 dan Berkelanjutan: Pastikan Keberlanjutan untuk APE)

Tujuan: Memenuhi indikator pemantauan hingga pelaporan.

- Langkah 3.1: Lakukan Pemantauan dan Evaluasi Berkala**
 Pantau outcome menggunakan indikator gender (misalnya penurunan pernikahan anak, akses perempuan ke akta).
Aksi: Rapat bulanan, validasi data.
Tanggung Jawab: Seksi Evaluasi.
Bukti Dukung: Laporan evaluasi.
- Langkah 3.2: Perkuat Pengawasan dan Pelaporan**
 Integrasikan pengawasan PUG, susun laporan tahunan ke Kemen PPPA.
Aksi: Laporkan ke Pokja PUG.
Tanggung Jawab: Kepala DISDUKCAPIL.
Bukti Dukung: Laporan PUG.
- Langkah 3.3: Evaluasi dan Penyesuaian Tahunan**
 Review pencapaian, sesuaikan rencana.
Aksi: Workshop akhir tahun.
Tanggung Jawab: Seluruh tim.

Rekomendasi Tambahan

- Kolaborasi:** Dengan Kemen PPPA, BPS, NGO untuk data dan pelatihan.
- Anggaran:** Alokasikan 10% untuk PUG.
- Monitoring Progres:** Gunakan tabel:

Aspek PUG	Target	Persentase Progres Saat Ini	Aksi Korektif	Deadline
SDM Terlatih	>80%	(Isi data)	Pelatihan	Bulan 3
Data Terpilah	>90%	(Isi data)	Validasi	Bulan 6
ARG	>5% Anggaran	(Isi data)	Review	Bulan 9
Program Responsif	>90%	(Isi data)	Analisis GAP	Bulan 12

Dengan langkah ini, DISDUKCAPIL dapat mempercepat PUG, mendukung Bengkulu meraih APE tingkat tinggi pada 2025.